

Peran Pemerintah Dan Kebijakan Publik Dalam Menghadapi Eksternalitas Perekonomian

Ahmad Sodiq¹, Jesy Malika Putri Utami², Wildanis Sururi Erhan³

¹Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung

Email: ahmadsodiq@uinsatu.ac.id

²Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung

Email: inijesy@gmail.com

³Mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung

Email: wildanerhan@gmail.com

Abstrak

Eksternalitas muncul ketika suatu aktivitas ekonomi menimbulkan pengaruh terhadap pihak lain di luar mekanisme pasar; baik berupa manfaat maupun kerugian. Ketidaksiharian antara dampak sosial dan harga pasar ini menimbulkan kegagalan pasar karena biaya atau manfaat sosial tidak tercermin secara memadai dalam harga yang terbentuk. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana eksternalitas memengaruhi pembentukan harga pasar di Indonesia melalui telaah literatur dari berbagai jurnal ilmiah. Temuan kajian menunjukkan bahwa eksternalitas negatif, seperti pencemaran dan kemacetan, mengakibatkan harga pasar tidak efisien dan sering kali berada di bawah nilai biaya sosial sebenarnya. Sementara itu, eksternalitas positif kerap tidak diperhitungkan sehingga barang atau jasa yang memberikan manfaat sosial besar cenderung kurang diproduksi. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting melalui instrumen fiskal, regulasi, dan subsidi untuk menginternalisasi eksternalitas, sehingga harga pasar dapat mencerminkan nilai sosial secara lebih tepat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Kata kunci: Eksternalitas, Biaya sosial, Kebijakan Publik, Kegagalan Pasar

PENDAHULUAN

Just et al. (2004) menjelaskan eksternalitas sebagai situasi di mana tindakan seorang aktor ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi aktor ekonomi lainnya, tanpa melibatkan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan mengenai tindakan tersebut. Stiglitz (2000) menggambarkan eksternalitas sebagai kerugian atau keuntungan yang dirasakan oleh individu atau perusahaan karena aktivitas yang dilakukan oleh individu atau perusahaan lainnya, namun individu atau perusahaan yang mengalami kerugian atau keuntungan tersebut tidak mendapatkan kompensasi atas dampak yang mereka alami. Di sisi lain, Pyndick (2005) menggambarkan eksternalitas sebagai perilaku produsen atau konsumen yang berdampak pada konsumen atau produsen lain, tetapi tidak diperhitungkan dalam penetapan harga.

Dalam perspektif Islam, konsep eksternalitas selaras dengan perintah menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf [7]: ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya"

Ayat ini melarang kerusakan akibat aktivitas ekonomi yang tidak memperhitungkan dampak negatif terhadap orang lain atau alam, seperti polusi dan kemacetan. Selain itu, QS. An-Nahl: 90 juga menekankan yang mendukung pencegahan ketidakadilan ekonomi akibat eksternalitas.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan"

Pasar bebas atau pasar dengan persaingan sempurna adalah jenis pasar yang dibentuk jika tiga syarat berikut dipenuhi, yaitu: 1) ada banyak perusahaan yang berkompetisi di pasar, dan setiap perusahaan hanya berfungsi sebagai pengikut harga; 2) produk yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan harus serupa; dan 3) perusahaan memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Beberapa keuntungan yang ada antara lain: 1) kemampuan menggunakan faktor produksi dengan efektif; 2) aktivitas ekonomi dalam pasar terorganisir dan terkoordinasi dengan baik; 3) pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan adalah pertumbuhan yang kuat; dan 4) pelaku ekonomi bebas memilih bidang usaha mereka sendiri (Colander, 2001). Namun, dalam suatu perekonomian kadang ada kondisi tertentu yang mencegah efisiensi pasar tercapai. Ada enam faktor utama yang menjadi penyebabnya, yaitu 1) kegagalan dalam persaingan; 2) adanya barang public; 3) pasar yang tidak lengkap; 4) informasi yang tidak sempurna; 5) pengangguran dan gangguan makroekonomi lainnya; dan 6) adanya eksternalitas. Jika salah satu dari enam kondisi ini muncul, maka pasar akan mengalami kegagalan.

Harga pasar memegang peranan penting dalam mengatur bagaimana sumber daya digunakan dalam perekonomian. Secara teori, harga idealnya mencerminkan seluruh biaya dan manfaat yang muncul dari proses produksi dan konsumsi agar pasar dapat berjalan efisien. Namun, kondisi ini sering tidak tercapai karena adanya eksternalitas, yaitu dampak tambahan dari suatu kegiatan ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar sehingga menimbulkan perbedaan antara biaya privat dan biaya sosial. Ketidaksiuaian ini menyebabkan mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara optimal.

Di Indonesia, berbagai bentuk eksternalitas muncul di banyak sektor, seperti industri, transportasi, pertambangan, serta aktivitas perkotaan. Eksternalitas negative misalnya polusi udara, pencemaran air, kebisingan, dan kemacetan masih sering terjadi dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Sementara itu, eksternalitas positif seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga nilai sosialnya tidak tercermin dalam aktivitas pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga pasar belum mampu menggambarkan nilai sosial secara utuh dan berkelanjutan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, intervensi pemerintah menjadi sangat penting untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat eksternalitas. Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti regulasi lingkungan, penerapan pajak Pigovian, penetapan standar emisi, pemberian subsidi untuk energi terbarukan, serta penyediaan barang publik. Instrumen-instrumen ini bertujuan agar biaya dan manfaat sosial dapat diperhitungkan dalam keputusan ekonomi para pelaku pasar. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berperan

sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pendukung dan pendorong agar kegiatan ekonomi tetap berlangsung secara efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menetapkan fokus pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam menangani eksternalitas di Indonesia. Kajian ini mencakup identifikasi bentuk eksternalitas yang terjadi, analisis terhadap instrumen intervensi yang diterapkan pemerintah, serta evaluasi mengenai keberhasilan kebijakan tersebut dalam memulihkan efisiensi pasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Novelty dari penelitian ini adalah sifatnya yang menyeluruh dan berbasis konteks. Dengan menyajikan beragam instrumen intervensi mulai dari pajak, regulasi, cap and trade, sampai kampanye serta pendidikan studi ini memberikan pandangan menyeluruh tentang usaha untuk menginternalisasi eksternalitas. Aspek lain yang menonjol adalah penegasan

bahwa pengelolaan eksternalitas bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga isu tentang tata kelola, etika publik, dan keberlanjutan. Penelitian ini menonjolkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak. Berbeda dengan penelitian lain yang mungkin hanya menyoroti peran pemerintah, studi ini secara jelas menyatakan bahwa keberhasilan dalam mengelola eksternalitas sangat tergantung pada kolaborasi antara kebijakan pemerintah yang tepat, kemampuan pelaku usaha untuk mengikuti regulasi serta berinovasi, dan kesadaran masyarakat. Penekanan pada penguatan lembaga, kemampuan birokrasi fiskal, serta digitalisasi pengawasan yang diusulkan juga menunjukkan kesadaran akan tantangan tata kelola yang menghambat pelaksanaan kebijakan di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Eksternalitas adalah dampak aktivitas ekonomi yang tidak diperhitungkan dalam harga pasar dan mempengaruhi pihak ketiga, bisa berupa eksternalitas negatif atau positif. Eksternalitas negatif, seperti polusi udara dan pencemaran lingkungan, tidak tercermin dalam harga barang atau jasa sehingga menyebabkan kegagalan pasar dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Sebaliknya, eksternalitas positif, seperti penciptaan lapangan kerja dan inovasi teknologi, seringkali kurang dihargai oleh mekanisme pasar.

Dalam konteks Indonesia, kegagalan pasar akibat eksternalitas menjadi permasalahan utama dalam mencapai efisiensi ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting melalui kebijakan fiskal dan regulasi untuk menginternalisasi eksternalitas agar harga pasar dapat mencerminkan biaya dan manfaat sosial secara akurat. Pendekatan ini mencakup penerapan pajak Pigovian untuk mengatasi eksternalitas negatif dan subsidi untuk mendukung eksternalitas positif.

Teori pengendalian eksternalitas oleh Arthur Pigou (Kholif, 2025) menjadi landasan utama dalam studi ini, menjelaskan bagaimana intervensi pemerintah diperlukan untuk memperbaiki kegagalan pasar akibat eksternalitas. Di samping teori klasik, literatur juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pelayanan publik dan digitalisasi sebagai solusi pengelolaan eksternalitas di era modern.

Untuk memperkuat dasar teori dan memahami hasil penelitian terdahulu, berikut disajikan ringkasan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan topik ini:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Tanan, C. I., & Duri, J. A. (Jurnal et al., 2021)	Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Eksternalitas dan Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Jayapura	Penelitian ini menemukan bahwa eksternalitas negatif sampah plastik di Kota Jayapura terus meningkat akibat tingginya penggunaan plastik sekali pakai serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Pemerintah Kota Jayapura telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti Surat Edaran pengurangan kantong plastik, Peraturan Walikota terkait pengelolaan sampah rumah tangga, serta instruksi penggunaan kantong alternatif. Selain itu, program bank sampah, daur ulang, dan kampung iklim turut dijalankan. Kebijakan tersebut menurunkan penggunaan kantong plastik di pasar modern, namun belum optimal karena belum diterapkan di pasar tradisional.
2.	(Maharani & Riofita, 2025)	Dampak Eksternalitas terhadap Perekonomian dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaannya	Penelitian menegaskan perlunya intervensi pemerintah untuk mengendalikan dampak eksternalitas melalui regulasi, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran publik. Pemerintah juga dipandang harus mengintegrasikan pendekatan preventif dan kuratif dalam menangani masalah eksternalitas, terutama dalam sektor-sektor yang menghasilkan limbah dan polusi.

3. (Gege Laudie et al., 2025) Pengaruh Eksternalitas Negatif dan Positif dalam Kebijakan Ekonomi Publik
- Hasil pembahasan menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas, konsisten, dan melibatkan masyarakat mampu meningkatkan partisipasi publik dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Kurangnya komunikasi atau miskomunikasi menyebabkan resistensi masyarakat dan membuat kebijakan menjadi tidak efektif.
4. Arisyah A, Riofita, H (Publik et al., 2025) Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mengatasi Eksternalitas, Barang Publik, Redistribusi Pendapatan, dan Penerapan Pajak Progresi
- instrumen seperti pajak Pigouvian dan subsidi tetap relevan untuk menginternalisasi eksternalitas, namun efektivitasnya bergantung pada perencanaan berbasis data, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan barang publik harus ditangani oleh negara untuk menghindari underprovision, sementara kebijakan redistributif (bantuan sosial, pajak progresif) perlu didukung oleh reformasi administrasi perpajakan dan digitalisasi data. Rekomendasi utama meliputi perumusan kebijakan yang holistik dan berbasis bukti, penguatan implementasi, serta peningkatan kolaborasi antar-institusi untuk mencapai hasil kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

5. (Wicaksono, 2012) Barang Publik dan Eksternalitas Pada Era Otonomi Daerah
- Barang publik memiliki sifat nonrivalry dan nonexcludability, sehingga dapat diakses semua orang tanpa mengurangi manfaat bagi pihak lain, serta disediakan melalui pajak dan kebijakan pemerintah. Perbedaan antara *public goods* dan *publicly provided goods* dijelaskan melalui penentuan kelompok penerima manfaat. Eksternalitas dipahami sebagai dampak sampingan dari konsumsi atau produksi yang tidak tercermin dalam harga pasar, seperti polusi, sehingga membutuhkan intervensi pemerintah melalui regulasi, tarif, atau pengawasan. Dalam konteks otonomi daerah, penyediaan barang publik dan penanganan eksternalitas masih menghadapi kendala seperti inkonsistensi kebijakan, lemahnya pengelolaan aset, serta kurangnya kapasitas teknis pemerintah daerah, sehingga pengendalian pencemaran dan pelayanan publik belum berjalan optimal.

- | | | | |
|----|---|--|---|
| 6. | Putra, S. K. dkk
(Putra et al.,
2025) | Analisis Peran
Pemerintah dalam
Perekonomian
Nasional melalui
Tiga Fungsi Utama
Fiskal: Alokasi,
Distribusi, dan
Stabilitas | Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal untuk menyediakan barang publik, mengurangi ketimpangan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, efektivitas ketiga fungsi tersebut masih terkendala oleh keterbatasan ruang fiskal, ketimpangan anggaran pusat–daerah, lemahnya tata kelola, serta tekanan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi fiskal, digitalisasi, dan penguatan transparansi agar kebijakan fiskal dapat berjalan lebih efisien, adil, dan adaptif. |
|----|---|--|---|

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis berbagai studi akademik dan kasus empiris di Indonesia terkait pengaruh eksternalitas pada harga pasar dan peran pemerintah dalam mengelolanya. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pasar dan keadilan sosial dalam perekonomian Indonesia. Metode ini bersifat deskriptif dan analitis, berfokus pada pemahaman konsep eksternalitas serta hubungan antara eksternalitas dan distorsi harga pasar. Literatur yang dikaji meliputi sumber sekunder yang valid dan relevan untuk menggambarkan fenomena eksternalitas serta solusi kebijakan yang ditempuh dalam konteks ekonomi Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti artikel jurnal ilmiah internasional dan nasional, buku referensi ekonomi, laporan lembaga pemerintahan, serta dokumen kebijakan. Pendekatan sistematis ini berguna untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis relevan dan memiliki kredibilitas tinggi (Creswell, 2014). (Creswell, J. W. (2014)., 2017)

Informasi yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa teisi, ensiklopedia, sebagian kecil dari internet dan bermacam sumber lainnya (Ilmu et al., 2022). Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok

dengan penelitiannya dimasa depan. Seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi dengan topik penelitian, validitas metodologis, dan kebaruan data, khususnya yang membahas eksternalitas, distorsi pasar, dan intervensi pemerintah di sektor ekonomi Indonesia. Selain itu, peneliti juga mengutamakan sumber yang memberikan perspektif empiris berupa studi kasus dan evaluasi kebijakan yang pernah dijalankan di Indonesia, guna memperoleh gambaran nyata soal dinamika pasar dan dampak kebijakan pemerintah (Neuman, 2017; Ilmu et al., 2022).

Analisis yang diterapkan bersifat deskriptif dan analitis kualitatif, di mana peneliti menguraikan konsep-konsep eksternalitas dan menelaah dampaknya terhadap harga pasar dalam konteks perekonomian Indonesia. Dengan cara ini, pola-pola pengaruh eksternalitas terhadap distorsi harga dapat dipahami secara komprehensif, sekaligus menilai efektivitas langkah-langkah kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut (Stiglitz, 1989; Tietenberg & Lewis, 2018).

Untuk memperkuat validitas temuan, studi literatur ini juga membandingkan hasil dari berbagai sumber akademik dengan data empiris yang diperoleh dari laporan pemerintah dan lembaga riset ekonomi Indonesia. Perbandingan ini bertujuan untuk menguji kesesuaian teori dengan kenyataan di lapangan sehingga hasil penelitian dapat lebih aplikatif dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang realistis dan bernilai guna bagi peningkatan efisiensi pasar dan keadilan sosial (Bappenas, 2021; World Bank, 2020).

Akhirnya, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap literatur yang dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan masing-masing studi serta perubahan regulasi dan kondisi ekonomi terkini di Indonesia. Pendekatan reflektif ini penting agar rekomendasi kebijakan tidak hanya berlandaskan teori semata, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis. Pemahaman mendalam ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti dan pembuat kebijakan dalam mengelola eksternalitas secara efektif ke depan (Ilmu et al., 2022; Sutaryo, 2019).

RESULT

Eksternalitas diartikan merupakan aktifitas yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan orang atau pihak yang lain sehingga dapat diukur dengan uang tetapi tidak masuk di dalam harga produk. Eksternalitas muncul jika kegiatan seseorang berdampak kepada orang lain (atau sekelompok orang lain) tetapi tidak mendapatkan kompesasi atau balas jasa dalam bentuk apa saja demikian juga dapat menimbulkan inefisiensi di dalam alokasi faktor produk (Mangkoesoebroto, 2016) (Christina & Jimmi, 2021).

Munculnya eksternalitas tidak terlepas dari ekonom dunia yaitu Alfred Marshall (Prasetyia, 2012) Marshall mengemukakan bahwa eksternalitas terjadi karena adanya variabel yang dikontrol atau dependent oleh adanya perantara ekonomi yang menghambat tingkat kepuasan perantara ekonomi lain. Menunjukkan maksud adanya proses produksi yang menghasilkan barang dan memiliki kegunaan atau bisa termasuk biaya tetapi belum yang belum termasuk segala biaya atau manfaat diperoleh, sehingga merupakan biaya yang masuk manfaat (benefit) sosial.

Bentuk-bentuk Eksternalitas dan Dampaknya

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa eksternalitas negatif menyebabkan harga pasar gagal mencerminkan biaya sosial secara akurat, sehingga mendorong terjadinya

produksi berlebih atas barang atau jasa yang menimbulkan dampak merugikan. Contoh kasusnya meliputi pencemaran lingkungan akibat limbah industri serta kemacetan yang mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menciptakan distorsi harga yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.

(Hartono et al., 2010) Eksternalitas negatif muncul ketika suatu kegiatan ekonomi menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas atau transaksi tersebut dan tidak memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Contoh umum eksternalitas negatif meliputi polusi udara dan pencemaran air yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Dampak tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan dan ekosistem, serta peningkatan biaya sosial yang tidak tercermin dalam harga pasar. Beberapa penelitian yang mengkaji dampak eksternalitas negatif antara lain:

1. PT. Eratex Djaja Probolinggo: Penelitian ini menemukan bahwa industri tekstil ini menyebabkan kemacetan akibat arus pergantian shift karyawan yang jumlahnya ribuan, serta penumpukan sampah akibat adanya pasar di belakang pabrik. Dampak negatif ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar .

2. PT. Kebun Tebu Mas Lamongan: Studi ini menunjukkan bahwa pabrik gula ini menghasilkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara dan air, yang mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

Sebaliknya, Eksternalitas Positif kurang dihargai dalam harga pasar, sehingga produksi barang dan jasa bernilai sosial tinggi menjadi kurang optimal. Misalnya, perusahaan yang memberikan manfaat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya mendapatkan penghargaan yang sebanding dalam harga pasar.

Eksternalitas positif terjadi ketika suatu aktivitas ekonomi memberikan manfaat kepada pihak lain yang tidak berpartisipasi langsung dalam transaksi tersebut dan tidak melakukan pembayaran atas manfaat yang diterima. Contoh eksternalitas positif antara lain vaksinasi massal yang menekan penyebaran penyakit, pendidikan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang memperluas aksesibilitas. Berbagai penelitian juga telah mengidentifikasi sejumlah dampak eksternalitas positif dalam konteks tersebut, antara lain:

1. Perkebunan Apel di Batu, Jawa Timur: Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan perkebunan apel meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pendapatan daerah melalui pajak dan sektor pariwisata .

2. Sentra Wisata Kuliner Bratang Surabaya: Studi ini menunjukkan bahwa keberadaan sentra kuliner ini menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pedagang, dan menarik wisatawan, meskipun juga menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara dan kemacetan .

3. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas yang dirasakan oleh pihak lain di luar aktivitas itu sendiri. Contohnya, dalam jurnal "Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan BP2T Provinsi Riau", pelayanan publik yang prima menciptakan eksternalitas positif, yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas seperti kemudahan berusaha,

efisiensi waktu, dan meningkatnya kepercayaan pada lembaga pemerintah, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam proses perizinan.

4. Jurnal "Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend

Sharia Fintech" membahas bagaimana persepsi peluang dan pengendalian risiko memengaruhi keinginan pelaku UMKM Muslim untuk merekomendasikan penggunaan fintech syariah, penelitian ini memiliki kaitan erat dengan konsep eksternalitas positif. Penggunaan fintech syariah oleh UMKM tidak hanya memberi manfaat pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat sekitar. Akses ke pembiayaan yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah mendorong pertumbuhan UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Dampak-dampak tersebut merupakan manfaat sosial yang dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam transaksi fintech, sehingga mencerminkan adanya eksternalitas positif dari adopsi teknologi keuangan syariah.

Peran Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Eksternalitas

(Ilmu et al., 2022) Dalam usaha untuk memenuhi harapan masyarakat, negara memiliki tanggung jawab utama untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup. Dalam konteks ini, negara harus menjamin dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Ini berarti negara wajib mengatur dan menyebarkan pengaruh atas penggunaan sumber daya ekonomi dengan adil dan merata. Teori ekonomi Islam menegaskan bahwa negara memiliki peranan krusial dalam aspek ekonomi. Para ulama menekankan bahwa pelaksanaan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Artinya, setiap keputusan yang diambil harus dilaksanakan melalui proses musyawarah yang melibatkan wakil-wakil rakyat. Meskipun agama Islam memberikan tanggung jawab luas kepada negara, hal ini tidak menyiratkan bahwa konsep Islam mengesampingkan kebebasan individu.

Adanya kegagalan di pasar menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dalam ekonomi secara efektif. Tujuan dari intervensi pemerintah mencakup beberapa aspek, yaitu memastikan kesetaraan hak bagi setiap individu dan menghapuskan penindasan, memastikan sektor ekonomi tumbuh dan berkembang, mengawasi perusahaan monopoli yang berpotensi mendominasi pasar agar tidak melakukan praktik merugikan, menjadi penyedia barang-barang untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur jalan raya, pendirian lembaga pendidikan, serta memperkuat keamanan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang dianggap tidak menguntungkan.

(Maharani & Riofita, 2025) Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani kegagalan pasar akibat eksternalitas, di antaranya melalui regulasi lingkungan, penerapan pajak karbon, pemberian subsidi bagi kegiatan yang ramah lingkungan, serta penguatan inovasi pelayanan publik dan digitalisasi. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengatasi eksternalitas yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh mekanisme pasar. Intervensi kebijakan publik dirancang untuk menginternalisasi dampak eksternalitas sehingga pelaku ekonomi mempertimbangkan konsekuensi sosial dari aktivitas yang mereka lakukan. Berikut ini merupakan beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang lazim diterapkan dalam upaya tersebut diantaranya :

1. Peneanaan Pajak (Pajak Pigouvian)

Penerapan pajak terhadap kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dinilai efektif. Pajak Pigouvian diberlakukan agar biaya sosial yang muncul dari aktivitas tersebut dapat tercermin dalam biaya produksi maupun konsumsi. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha didorong untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan atau beralih pada praktik yang lebih ramah lingkungan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon dapat menurunkan emisi gas rumah kaca di sejumlah negara maju, meskipun keberhasilannya tetap memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan terstruktur.

(Sagita et al., 2023) Eksternalitas muncul ketika tindakan ekonomi dari satu individu atau entitas mempengaruhi individu atau entitas lain tanpa ada mekanisme harga yang terlibat. Contohnya termasuk polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik yang merugikan masyarakat di sekitarnya tanpa adanya ganti rugi. Disisi lain, contoh eksternalitas positif adalah ketika seorang menanam pohon yang memberikan keuntungan lingkungan bagi sekitarnya. Pemerintah memiliki mandat untuk memperbaiki kegagalan pasar ini melalui alat-alat fiskal, salah satunya adalah pajak Pigouvian. Pajak ini dirancang untuk memasukkan biaya eksternal yang tidak terwakili dalam harga pasar. Sebagai contoh, pajak karbon diterapkan untuk mendorong para pelaku industri mengurangi emisi karbon, sehingga mereka mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan produksi mereka. (Riofita, 2023, hlm. 146) dikutip oleh (Maharani & Riofita, 2025)

Namun, seberapa efek instrumen ini sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan implementasinya. Pajak yang diterapkan terlalu tinggi dapat melemahkan daya saing industri, sedangkan pajak yang rendah tidak mendorong perubahan perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu penetapan tarif harus dilakukan melalui penelitian akademis dan diskusi publik untuk mencapai kebijakan yang adil.

Selain pajak, pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk aktivitas yang menghasilkan eksternalitas positif, seperti penelitian dan pengembangan (R&D), pendidikan, dan program vaksinasi. Namun, pemberian subsidi ini perlu disertai dengan sistem akuntabilitas serta evaluasi yang berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mengatasi eksternalitas masih menghadapi kendala terkait data, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek kelembagaan serta penguatan kapasitas birokrasi fiskal agar penerapan alat-alat ini dapat lebih efektif dan efisien.

2. Regulasi dan Standar Hukum

Pemerintah dapat memberlakukan regulasi yang membatasi atau melarang aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan maupun masyarakat. Bentuk regulasi tersebut dapat mencakup penetapan batas maksimal emisi, standar kualitas udara dan air, serta pelarangan penggunaan bahan yang membahayakan. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi juga berperan sebagai instrumen yang mendorong pelaku usaha untuk menerapkan proses produksi yang lebih bertanggung jawab. Di Indonesia, pengaturan terkait pengelolaan limbah industri dan penanganan sampah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pengendalian pencemaran.

3. Sistem Kuota dan Perdagangan Izin Emisi (Cap and Trade)

Sistem *cap and trade* menetapkan batas total emisi yang diperkenankan dan kemudian membagikan izin emisi kepada pelaku usaha. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisinya hingga berada di bawah batas yang ditetapkan dapat menjual kelebihan izin tersebut kepada perusahaan lain. Mekanisme ini menggabungkan pengendalian kuantitatif dengan prinsip pasar, sehingga pengurangan emisi dapat dicapai secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun penerapannya di Indonesia masih terbatas, sistem *cap and trade* telah berhasil diterapkan di sejumlah negara sebagai salah satu alternatif efektif dalam pengendalian polusi.

4. Subsidi dan Insentif untuk Eksternalitas Positif

Dalam rangka mendorong aktivitas yang menghasilkan manfaat sosial, pemerintah dapat menyediakan subsidi atau insentif. Contohnya meliputi subsidi untuk pendidikan, vaksinasi, serta penelitian dalam teknologi ramah lingkungan. Kebijakan tersebut bertujuan memperluas dampak positif eksternalitas. Dengan adanya subsidi, biaya produksi maupun konsumsi menjadi lebih rendah, sehingga semakin banyak individu dan pelaku usaha yang terdorong untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

5. Penyediaan Barang dan Layanan Publik

Sektor swasta umumnya tidak memiliki insentif yang kuat untuk menyediakan barang atau jasa yang memberikan manfaat sosial luas, terutama ketika potensi keuntungan ekonominya terbatas. Oleh karena itu, pemerintah mengambil peran dengan menyediakan berbagai barang dan layanan publik, seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan, serta infrastruktur transportasi. Penyediaan tersebut bertujuan memastikan pemerataan akses bagi masyarakat serta memaksimalkan manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan penduduk.

6. Kampanye, Edukasi, dan Kemitraan

Selain melalui instrumen fiskal dan regulasi, pemerintah juga melaksanakan program kampanye serta edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak eksternalitas. Upaya seperti sosialisasi pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan promosi pola hidup sehat merupakan bentuk intervensi non-finansial yang terbukti efektif. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat turut memperkuat pelaksanaan berbagai program yang bertujuan mendukung pengelolaan eksternalitas secara lebih komprehensif.

Walaupun sejumlah kebijakan telah menunjukkan hasil yang positif, pengelolaan eksternalitas masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan anggaran, serta koordinasi antar-sektor yang belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan upaya internalisasi eksternalitas pada masa mendatang.

Pengelolaan eksternalitas di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya kapasitas pengawasan, alokasi anggaran yang kurang optimal, serta koordinasi lintas sektor yang belum berjalan secara efektif. Untuk itu, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi

menjadi elemen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan eksternalitas. Melalui kebijakan yang mampu menginternalisasi eksternalitas, harga pasar dapat lebih mencerminkan biaya dan manfaat sosial yang sesungguhnya, sehingga mendorong efisiensi dalam alokasi sumber daya, mewujudkan keadilan sosial, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

DISCUSSION

Hasil penelitian ini menegaskan kembali peran sentral eksternalitas sebagai bentuk utama kegagalan pasar yang menuntut intervensi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan teoritis klasik dari Stiglitz (2000) dan Pyndick (2005) yang mendefinisikan eksternalitas sebagai dampak yang tidak diperhitungkan dalam harga pasar. Namun, studi ini memperluas fokus dengan secara eksplisit mengkaji eksternalitas dalam konteks Indonesia, mengidentifikasi secara spesifik bentuk-bentuk eksternalitas negatif (seperti polusi udara, kemacetan) dan positif (penciptaan lapangan kerja, inovasi teknologi) yang terjadi di sektor-sektor lokal. Diskusi sebelumnya seringkali berfokus pada kerangka teori, sementara penelitian ini mencoba membumikan konsep tersebut dengan data empiris dan kondisi regulasi aktual di Indonesia.

Dalam hal solusi kebijakan, penelitian ini mencakup instrumen-instrumen yang telah lazim dibahas dalam literatur ekonomi, seperti Pajak Pigouvian dan Subsidi. Sejalan dengan temuan (Maharani & Riofita, 2025), studi ini mengkonfirmasi bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan tersebut, termasuk regulasi lingkungan dan digitalisasi pengawasan. Namun, penelitian ini memberikan konteks kritis tambahan, menyoroti bahwa penerapan alat fiskal seperti subsidi dan pajak Pigouvian di Indonesia masih menghadapi kendala signifikan terkait data, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Hal ini membedakannya dari studi yang mungkin hanya berfokus pada potensi efektivitas teoretis instrumen tersebut.

Salah satu kelebihan utama penelitian ini adalah sifatnya yang komprehensif dan kontekstual. Sebagai kajian literatur (*literature review*), studi ini berhasil mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi akademik serta kasus empiris di Indonesia untuk menghasilkan rekomendasi yang realistis dan aplikatif. Dengan menyajikan berbagai instrumen intervensi—mulai dari pajak, regulasi, *cap and trade*, hingga kampanye dan edukasi—penelitian ini memberikan gambaran holistik mengenai upaya internalisasi eksternalitas. Kelebihan lainnya adalah penegasan bahwa pengelolaan eksternalitas bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga isu tata kelola, moral publik, dan keberlanjutan.

Penelitian ini unggul dalam menyoroti pentingnya sinergi multi-pihak. Berbeda dengan studi yang mungkin hanya memfokuskan pada peran pemerintah, studi ini secara eksplisit menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan eksternalitas sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah yang tepat, kapasitas pelaku usaha untuk mematuhi regulasi dan berinovasi, serta kesadaran masyarakat. Penekanan pada penguatan kelembagaan, kapasitas birokrasi fiskal, dan digitalisasi pengawasan yang diusulkan juga menunjukkan kesadaran akan masalah tata kelola yang menjadi penghalang implementasi kebijakan di Indonesia.

Sebagai studi tinjauan literatur (*literature review*), kekurangan utama penelitian ini adalah sifatnya yang deskriptif dan analitis, yang berarti tidak menyajikan data empiris primer atau pengujian statistik baru. Penelitian ini merangkum temuan sebelumnya, tetapi

belum melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas instrumen kebijakan secara empiris yang lebih luas, seperti disarankan oleh peneliti itu sendiri di bagian penutup. Keterbatasan ini membuat rekomendasi seperti "implementasi kebijakan seperti pajak Pigovian, subsidi hijau, dan digitalisasi pengawasan" masih bersifat saran untuk penelitian lanjutan, bukan hasil temuan yang terukur.

Kekurangan lain terkait dengan rekomendasi yang diberikan. Meskipun studi ini menyarankan agar pembaca mendorong diskusi kritis mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal di berbagai daerah, penelitian ini sendiri tidak memberikan kerangka atau analisis mendalam mengenai variasi konteks lokal tersebut. Selain itu, walaupun telah mengidentifikasi hambatan implementasi (misalnya masalah data dan koordinasi), penelitian ini belum secara rinci memetakan langkah-langkah praktis dan spesifik untuk mengatasi kelemahan kelembagaan tersebut, sehingga rekomendasinya mungkin masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut di tingkat operasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai peran eksternalitas sebagai salah satu bentuk utama dari kegagalan pasar yang menuntut adanya intervensi kebijakan pemerintah untuk mencapai efisiensi ekonomi sekaligus keadilan sosial. Eksternalitas, baik yang bersifat negatif seperti pencemaran udara dan air, kemacetan lalu lintas yang menurunkan produktivitas, degradasi ekosistem, maupun eksternalitas positif seperti penciptaan lapangan kerja baru, percepatan inovasi teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, dan berbagai manfaat sosial lainnya, memainkan peran signifikan dalam membentuk struktur pasar serta mempengaruhi alokasi sumber daya di dalam perekonomian. Namun, mekanisme pasar yang berjalan secara bebas sering kali tidak mampu menginternalisasi biaya sosial dari eksternalitas negatif maupun manfaat sosial dari eksternalitas positif tersebut. Akibatnya, harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai sosial yang sesungguhnya sehingga menimbulkan distorsi dalam penentuan harga dan keputusan produksi. Distorsi ini kemudian mendorong terjadinya produksi berlebih terhadap barang dan jasa yang merugikan lingkungan serta menyebabkan kurangnya produksi terhadap barang dan jasa yang membawa manfaat besar bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui regulasi, insentif, dan kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk memulihkan keseimbangan pasar, memastikan distribusi manfaat yang lebih adil, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran pemerintah menjadi semakin krusial dalam mengatasi permasalahan eksternalitas melalui beragam instrumen kebijakan yang dirancang untuk menata kembali mekanisme pasar agar lebih mencerminkan nilai sosial yang sebenarnya. Salah satu instrumen yang paling dikenal adalah pajak Pigovian, yakni pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha untuk memberikan insentif ekonomi agar mereka mengurangi kegiatan yang menghasilkan eksternalitas negatif seperti polusi, kerusakan lingkungan, dan kemacetan. Selain pajak, pemerintah juga dapat menggunakan berbagai bentuk subsidi, insentif fiskal, dan regulasi yang ketat untuk mendorong munculnya eksternalitas positif, misalnya melalui dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, serta program-program yang memberikan manfaat sosial jangka panjang. Implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk menginternalisasi seluruh biaya dan manfaat sosial ke dalam struktur harga pasar sehingga proses produksi dan konsumsi

menjadi lebih terkendali, efisiensi ekonomi dapat tercapai, dan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan. Selain instrumen ekonomi, kampanye, edukasi, dan kemitraan lintas sektor turut memperkuat upaya pengendalian eksternalitas. Serangkaian kebijakan ini bertujuan untuk menginternalisasi biaya dan manfaat sosial agar perilaku pelaku ekonomi lebih selaras dengan kepentingan masyarakat luas.

Sebagai saran, pembaca diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut implementasi kebijakan seperti pajak Pigovian, subsidi hijau, dan digitalisasi pengawasan dengan pendekatan empiris yang lebih luas, serta mendorong diskusi kritis mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan konteks lokal di berbagai daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas instrumen kebijakan tertentu, pengukuran dampak eksternalitas dengan metode kuantitatif yang lebih akurat, serta eksplorasi peran teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) dalam memantau dan menginternalisasi eksternalitas secara lebih efisien. Penelitian di masa depan juga dapat mengkaji dinamika perilaku pelaku usaha, kesiapan institusi daerah, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan berbasis digital. Dengan pengembangan kajian yang lebih komprehensif, diharapkan upaya pengelolaan eksternalitas di Indonesia dapat semakin efektif, adaptif, dan memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Christina, & Jimmi. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Eksternalitas Dan Pengelolaan Sampah Plastik Di Kota Jayapura JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(1), 1–16.
- Creswell, J. W. (2014). (2017). 17(2014).
- Fadli, M., Syahril Huda, M., Alfarizi, M., Putri, U., & Majid, A. (2025). Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi. *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 13–27.
<https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/qurania/article/view/1030>
- Gege Laudie, Briean Sandika Arjuna, Fawwaz Ghufuran, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Pengaruh Eksternalitas Negatif dan Positif dalam Kebijakan Ekonomi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 2(3), 102–112.
<https://doi.org/10.62383/komunikasi.v2i3.467>

- Hartono, D., Yusuf, A. A., Budy, D., & Resosudarmo, P. (2010). *Konsep Dasar Persoalan Eksternalitas 1*. 49–64.
- Ilmu, J., Jisip, P., Januari, N., Novita, Y., Wicaksono, P. N., Taufiqi, M., Mustofa, L., Ekonomi, M., Fakultas, S., Iain, P., & Salatiga, I. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan 2371 | Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi pengaturan jumlah penerimaan negara , kemudian kebijakan dalam upaya pengata. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(1), 2371–2381.
- Jurnal, J., Mea, I., & Geissler, U. O. (2021). *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Eksternalitas Dan Pengelolaan Sampah Plastik Di Kota Jayapura JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 5(1), 1–16.
- Kholif. (2025). *EKSTERNALITAS PENETAPAN KEBIJAKAN PAJAK KARBON DI INDONESIA*. 2, 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Maharani, T., & Riofita, H. (2025). Dampak Eksternalitas terhadap Perekonomian dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaannya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 15944–15948. <https://jptam.org/index.php/jptam>
- Publik, B., Pendapatan, R., Progresi, P., Arisyah, A., & Riofita, H. (2025). *Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Publik dalam Mengatasi Eksternalitas* , .
- Putra, S. K., Wahyu Setiani, Dinda Astuti, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 408–416. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5380>
- Sagita, D., Arini, P., Riofita, H., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Publik, K., & Pasar, K. (2023). Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi*, 8(5), 129–133.
- Wicaksono, K. W. (2012). *PADA ERA OTONOMI DAERAH PUBLIC GOODS AND THE ERA OF REGIONAL*. 281–286.